

**PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA DAERAH DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN**
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



OLEH:

ATIKA KURNIADI
NPM : 171000462201056

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2021

**PENGRUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA DAERAH DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017-2020)**

ATIKA KURNIADI
171000462201056

Pembimbing 1 : WITRA MAISON, SE, M.Si

Pembimbing 2 : HJ. NIDIA ANGGRENI DAS, SE, M.M

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari [Http://sumbar.bps.go.id](http://sumbar.bps.go.id). Analisis yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, koefisien determinasi *r-square* dan pengujian hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai *t* hitung sebesar $0,686 < 1,6657$, dan nilai signifikansi sebesar $0,495 > 0,05$. (2) Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai *t* hitung sebesar $0,613 < 1,6657$, dan nilai signifikansi sebesar $0,542 > 0,05$. (3) Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai *t* hitung sebesar $5,435 > 1,6657$, dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. (4) Dana perimbangan, belanja daerah dan pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai *F* hitung sebesar $19,311 > 2,34$ dengan nilai signifikannya $0,00 < 0,05$.

**Kata Kunci : Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah,
Kinerja Keuangan**

**THE EFFECT OF BALANCED FUNDS, REGIONAL EXPENDITURES
AND REGIONAL ORIGINAL REVENUE ON FINANCIAL
PERFORMANCE (EMPIRICAL STUDY ON REGENCY/CITY
GOVERNMENTS OF WEST SUMATRA PROVINCE 2017-2020)**

ATIKA KURNIADI
171000462201056

Supervisor 1 : WITRA MAISON, SE, M.Si

Supervisor 2 : HJ. NIDIA ANGGRENI DAS, SE, M.M

ABSTRACT

This study aims to determine the Effect of Balancing Funds, Regional Expenditures and Regional Original Revenues on the Financial Performance of Districts/Cities in West Sumatra Province in 2017-2020. The sample used is 19 districts/cities in West Sumatra Province in 2017-2020. The sampling technique used was total sampling. The type of data used is secondary data in the form of financial reports obtained from [Http://sumbar.bps.go.id](http://sumbar.bps.go.id). The analysis used includes normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, r-square coefficient of determination and hypothesis testing.

The results of this study indicate that (1) balancing funds have no effect on financial performance. This is evidenced by the t arithmetic value of $0.686 < 1.6657$, and a significance value of $0.495 > 0.05$. (2) Regional expenditures have no effect on financial performance. This is evidenced by the t arithmetic value of $0.613 < 1.6657$, and a significance value of $0.542 > 0.05$. (3) Local revenue partially affects financial performance. This is evidenced by the t-count value of $5.435 > 1.6657$, and the significance value of $0.000 < 0.05$. (4) Balancing funds, regional expenditures and regional original revenues simultaneously affect financial performance. This is evidenced by the calculated F value of $19.311 > 2.34$ with a significant value of $0.00 < 0.05$.

Keywords : Balancing Fund, Regional Expenditure, Regional Original Income, Financial Performance

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara adalah wilayah yang ditempati masyarakat dan memiliki suatu organisasi yang berfungsi untuk mengurus kepentingan-kepentingan negara. Organisasi tersebut merupakan suatu lembaga pemerintahan yang bersifat nirlaba. Lembaga pemerintah pada setiap negara memiliki peranan dalam meningkatkan pelayanan guna memfasilitasi kepentingan masyarakat yang secara tidak langsung memiliki dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang dicapai dengan cara mengelola keuangan pemerintah dengan baik. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan penerapan kebijakan otonomi pada suatu daerah.

Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah, mengukur potensi mendapatkan atau sumber ekonomi, mengetahui kondisi keuangan, mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan menyakini bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan keuangan. Penilaian kinerja dapat dilihat dari dua aspek. Aspek pertama yaitu aspek yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan keuangan organisasi atau tertentu disebut dengan kinerja non keuangan (*non financial performance*). Aspek kedua yaitu aspek aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan organisasi atau instansi tertentu dikatakan sebagai Kinerja Keuangan (*financial performance*).

Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar (Pongoh, 2013). Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standart dan ketentuan dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Berdasarkan pasal 4 ayat 1 SAP No. 71 tahun 2010 pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual. PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan (*due process*), Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam Lampiran III SAP No. 71 tahun 2010 tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Sebagai implikasinya, peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan ekonomi itu sendiri. Berdasarkan pasal 31 ayat 1 PP No. 19 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah mengungkapkan bahwa PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Disamping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Bastian, 2012).

Tabel 1.1
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2017-2020

Tahun	Laporan Realisasi Anggaran (Rp)		
	PAD	Dana Perimbangan	Belanja Daerah
2017	Rp. 2.530.121.133	Rp. 14.829.844.350	Rp. 19.415.152.589
2018	Rp. 1.977.353.904	Rp. 15.051.531.840	Rp. 19.825.614.942
2019	Rp. 2.097.851.123	Rp. 15.865.822.519	Rp. 21.846.652.410
2020	Rp. 2.650.316.185	Rp. 16.039.147.172	Rp. 22.825.783.224
Total	Rp. 9.255.642.345	Rp. 61.786.345.881	Rp. 83.913.203.165
Persentase	6,1%	39,8%	54,1%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Secara keseluruhan PAD setiap Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan selama 4 tahun penelitian yang berarti pendapatan yang dihasilkan oleh daerah menunjukkan konsistensi pendapatan yang meningkat setiap tahunnya. Naiknya PAD diikuti oleh penerimaan Dana Perimbangan yang setiap tahunnya juga relatif naik. Jika ditinjau dari segi kemandirian daerah, PAD mengalami kenaikan sebesar 6,1% dan dana perimbangan sebesar 39,8%, artinya lebih dari setengah pengeluaran belanja daerah bersumber dari dana perimbangan. Hal itu menandakan bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan dana perimbangan dalam membiayai belanja daerah yang penggunaannya harus digunakan secara optimal.

Besarnya dana perimbangan menunjukkan bahwa ketersediaan dana dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan lebih baik sesuai

dengan tujuan dana perimbangan (Awwaliyah, 2019). Menaikkan anggaran belanja daerah yang besar merupakan upaya untuk mendapatkan jumlah transfer yang besar. Pernyataan tersebut bisa menggambarkan masih kurang optimal pengelolaan keuangan daerah sehingga hal tersebut menimbulkan konsekuensi logis yang harus diterima oleh Pemerintah Daerah yaitu buruknya penilaian kinerja keuangan daerah tersebut. Untuk meminimalisir dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah harus memaksimalkan potensi-potensi dan kemampuan sumber daya daerahnya untuk mendapatkan penerimaan pendapatan yang maksimal juga.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Saputri, 2020). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, artinya adanya kenaikan PAD dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian (Indriani dan Sastradipraja, 2014) menyatakan secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian (Andirfa, 2016) menyatakan bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, dan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Penelitian (Sari, 2016) menyatakan bahwa dana perimbangan terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja daerah dalam penelitian ini dihitung dari besarnya belanja langsung dan belanja tidak langsung pada pemerintah Kabupaten/Kota. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 36 tentang pemerintahan daerah mendefinisikan bahwa belanja daerah merupakan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Tujuan dipergunakannya belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan bersama.

Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial (Pongoh, 2013). Semakin tinggi belanja daerah, pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakatnya. Penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. (Retnowati, 2016).

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik menurut penelitian (Wahyuningsih, 2020). Dana perimbangan

ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat dibidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (pajak dan sumber daya alam) dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Berdasarkan pasal 288 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Ketiga jenis sumber dana tersebut, merupakan pendanaan pelaksanaan Desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Pengeluaran pemerintah daerah yang dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah dalam membiayai kegiatan operasional pemerintahan. Kegiatan belanja daerah turut berperan dalam menghasilkan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari potensi-potensi yang dimiliki daerah, (Antari dan Sedana, 2018). Belanja daerah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas pelayanan publik pada suatu daerah. Belanja yang dilakukan pemerintah memiliki fungsi sebagai suatu kebijakan ekonomi yang akan berdampak pada kemandirian daerah dan pertumbuhan perekonomian di suatu daerah, belanja pemerintah dapat menyebabkan terjadinya stabilitas pada perekonomian (Menyah dan Rufael, 2013).

Dengan adanya era desentralisasi, pengawasan keuangan terhadap pemerintah daerah harus lebih efektif dilakukan oleh pemerintah pusat agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dengan membentuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melaksanakan fungsi pengawasan keuangan internal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan fungsi pengawasan eksternal.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin mengetahui dan mencoba melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Pendapatan Asli daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2020.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.
2. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

4. Apakah Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui Belanja Daerah berpegaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh pada proses pembelajaran di kampus serta dengan adanya penelitian ilmu dan wawasan penulis dapat bertambah.

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Kinerja Keuangan melalui Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Barat.
3. Sebagai pedoman maupun referensi dalam penulisan atau penelitian berikutnya.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan proposal ini merupakan garis besar dari penyusunan pemikiran untuk memahami keseluruhan isi proposal, sistematika dari proposal ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori dari masing-masing variabel penelitian ,yaitu kinerja keuangan, pendapatan asli daerah, belanja daerah, dan dana perimbangan. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan juga pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan teknik pengumpulan data, variabel penelitian, operasional variabel dan pengukuran variabel serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, pengujian dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran baik untuk peneliti selanjutnya ataupun untuk tempat penelitian dilakukan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2017-2020, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai t_{hitung} $0,686 < t_{tabel}$ $1,6657$ dan nilai signifikansi t dari X_1 sebesar $0,495 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) ditolak yaitu tidak ada pengaruh antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan.
2. Nilai t_{hitung} $0,613 < t_{tabel}$ $1,6657$ dan nilai signifikansi t dari X_2 sebesar $0,542 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) ditolak yaitu tidak ada pengaruh antara belanja daerah terhadap kinerja keuangan.
3. Nilai t_{hitung} $5,435 > t_{tabel}$ $1,6657$ dan nilai signifikansi t dari X_2 sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_3) diterima yaitu adanya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan.
4. Nilai F_{hitung} $19,311 > F_{Tabel}$ $2,34$ dengan nilai signifikannya $0,00 < 0,05$ artinya secara simultan ada pengaruh atau hubungan yang signifikan antara Dana Perimbangan (X_1), Belanja Daerah (X_2), dan Pendapatan Asli Daerah (X_3) terhadap Kinerja Keuangan (Y).

5. Nilai Adjusted R square sebesar 0,423 atau 42,3%. Hal ini berarti 42,3% dari variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan dipengaruhi oleh variabel independent yaitu Dana Perimbangan (X1), Belanja Daerah (X2), dan Pendapatan Asli Daerah (X3). Sedangkan 57,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Variabel lainnya adalah Kekayaan Daerah (Ibrahim dan Aliamin, 2015), Belanja Modal (Pratiwi, 2018).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka saran-saran yang diajukan adalah

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat agar dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerahnya baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya agar dapat meningkatkan pendapatan daerahnya, serta memperhatikan alokasi terhadap anggaran belanja yang dikeluarkan agar lebih efisien dan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah, baik kinerja keuangan maupun pelayanan publik.
2. Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya agar menambah variabel independen yang berkaitan seperti dana perimbangan, belanja daerah, pendapatan asli daerah, pajak daerah, dan Dana Hibah Pemerintah Pusat, Dan-lain-lain, agar dapat diketahui lebih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariwibowo, Tungki. 2015. "Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi* 11:335.
- Anggreni, Ni Ketut Ayu, Sri Artini, Luh Gede (2018). "Pengaruh PAD, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali". Skripsi.
- Antari, Ni Putu Gina Sukma, Sedana, Ida Bagus Panji, 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". Skripsi.
- Ayu, Puspita Putri. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Dan Belanja Modal." *Jurnal Akuntansi & Ekonomi* 3(1):80–96.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nanang Martono.(2014).*Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder Edisi Ke 2*.Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pongoh, Marsel. 2013. "Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pt. Bumi Resources Tbk." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1(3):669–79. doi: 10.35794/emba.v1i3.2135.
- Prasasti, Swastika, and Ratna Sari. 2015. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah

(Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Diy Tahun 2007-2013).” Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen 12(1):1–13.

Pratiwi, Tri Yuni. 2018. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016.” Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2018.

Purwasih. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (studi kasus di provinsi daerah istimewa yogyakarta).

Putri, Evrintia Dini. 2015. “Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur.” 151:10–17. doi: 10.1145/3132847.3132886.

Saputri, Sealys. 2020. “pengaruh dana perimbangan, belanja daerah, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah .” E- Jurnal EP Unud (23):452–59.

Siti Nur Rochmah. 2015. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta 151:10–17. doi: 10.1145/3132847.3132886.

Sugiyono, Prof. Dr. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Wahyuningsih, Yoshinta Endah. 2020. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.” Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik 15(2):111. doi: 10.25105/jipak.v15i2.6226.